

WHEN THE EARTH SHOOK AND MEANINGS SHIFTED: THE 1867 YOGYAKARTA EARTHQUAKE IN JAVANESE COSMOLOGY

Ketika Tanah Berguncang dan Makna Bergeser: Gempa Bumi Yogyakarta 1867 dalam Kosmologi Jawa

Sinta Permatasari ^{1a(*)} Eka Yudha Wibowo ^{2b}

¹²Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Semarang

^asintaprmtsa31@students.unnes.ac.id

^bekayudha@mail.unnes.ac.id

(*) Corresponding Author

sintaprmtsa31@students.unnes.ac.id

How to Cite: Sinta Permatasari. (2026). When the Earth Shook and Meanings Shifted: The 1867 Yogyakarta Earthquake In Javanese Cosmology. doi: 10.36526/js.v3i2.7642

Abstract

Received : 08-01-2026

Revised : 10-03-2026

Accepted : 12-04-2026

Keywords:

Yogyakarta,
Earthquake,
Javanese Cosmology,
Golong Gilig Monument.

The 1867 Yogyakarta earthquake was one of the most destructive earthquakes on the island of Java in the 19th century, causing significant impacts not only in physical terms but also socially and culturally. This study aims to analyze the 1867 Yogyakarta earthquake as a socio-cultural event, the post-earthquake changes to the Tugu Golong Gilig monument, and its significance from a Javanese cosmological perspective. This study employs a historical method with a qualitative approach through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Research sources include colonial archives, Dutch East Indies government reports, contemporary newspapers, and supporting literature. The findings indicate that the 1867 earthquake was understood as a sign of the disruption of cosmic balance in the Javanese people's view. The collapse of the Golong Gilig Monument was interpreted as a symbol of the disruption of harmony between the king, the people, and nature. The change in the monument's form following the earthquake represented an effort to restore that balance. These findings indicate that natural disasters in the Javanese context are not merely understood as physical phenomena but also as symbolic events tied to the community's cosmology.

PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis, berada pada zona pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Indo-Australia. Kondisi ini menyebabkan wilayah Indonesia termasuk dalam kawasan jalur cincin api atau *ring of fire*, yaitu rangkaian jalur aktivitas vulkanik dan seismik yang membentang sepanjang lempeng pasifik, yang dikenal sebagai salah satu lempeng tektonik teraktif di dunia. Kondisi geologis ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu kawasan dengan tingkat aktivitas seismik tertinggi di dunia, dengan kontribusi signifikan terhadap kejadian gempa bumi besar secara global (Anggraini, 2024). Salah satu wilayah dengan tingkat rawan gempa yang tinggi adalah wilayah selatan Pulau Jawa, mengingat wilayah selatan Jawa memiliki posisi secara geografis berhadapan langsung dengan zona subduksi antara Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Adanya kondisi tektonik tersebut mengakibatkan Pulau Jawa sering mengalami aktivitas gempa bumi (Hidayat, 2023).

Pada konteks regional, Yogyakarta menjadi salah satu wilayah di Pulau Jawa yang secara historis memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi pada gempa bumi. Dalam sejarah tercatat gempa besar telah beberapa kali terjadi di wilayah ini, termasuk peristiwa Gempa Yogyakarta tahun 1867 yang dikenal sebagai gempa Jawa, karena menjadi salah satu gempa dahsyat yang merusak di wilayah Jawa pada abad ke-19. Gempa ini menyebabkan ribuan bangunan hancur serta merusak pusat kekuasaan dan simbol kebudayaan Kesultanan Yogyakarta, seperti Keraton, Tugu Golong Gilig, Panggung Krapyak, bahkan kantor-kantor pemerintah kolonial Belanda.

Dalam catatan kolonial seperti yang dimuat dalam surat kabar *De Locomotief* memberikan penjelasan mengenai skala kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi Yogyakarta tahun 1867, yang menegaskan bahwa bencana ini bukan hanya sebuah peristiwa geologi, melainkan juga tragedi sosial yang menimbulkan dampak kerusakan yang besar dan berpengaruh bagi kehidupan sosial, budaya masyarakat pada masa itu. Gempa bukanlah menjadi suatu fenomena baru, melainkan sebuah peristiwa yang berulang. Gempa bumi di Yogyakarta tercatat dalam rekaman kegempaan telah terjadi kurang lebih sebanyak 12 kali, data pertama gempa ditemukan yaitu tahun 1840, kemudian disusul lagi tahun 1859, 1867, 1875, 1937, 1957, 1981, 1992, 2001, 2004, dan 2006 (Kontinjensi, 2016). Salah satu peristiwa gempa bumi besar yang jarang dibahas namun memiliki dampak luas adalah Gempa Yogyakarta pada tahun 1867.

Seorang geolog Belanda S.W Visser menjelaskan bahwa gempa bumi besar tahun 1867 terjadi selama 70 detik dengan pusat gempa yang berada di sekitar aliran Sungai Opak atau sepadan dengan sesar Opak. Lokasi gempa tersebut menunjukkan kesamaan dengan sumber gempa yang terjadi pada tahun 2006. Ki Sabdacaratama dalam Sejarah Keraton Yogyakarta (2009) menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi akibat gempa 1867 yaitu beberapa sarana prasarana seperti pabrik-pabrik gula, Candi Sewu, kompleks keraton, serta masjid besar kesultanan terdampak gempa. Dampak paling simbolis dari gempa 1867 yaitu runtuhnya Tugu Golong Gilig, yang mana tugu ini menjadi simbol *manunggaling kawula gusti*, yang merupakan persatuan antara rakyat dan sultan atau raja. Tugu Golong Gilig selain menjadi simbol, tugu ini juga memiliki makna filosofis yaitu sebagai poros Yogyakarta yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton, dan Laut Selatan (Sabdacarakatama, 2009).

Runtuhnya tugu tersebut akibat gempa dimaknai masyarakat sebagai terganggunya keseimbangan simbolik dan kosmologis masyarakat Jawa pada masa itu. Rekonstruksi tugu tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan peresmian kembali tugu oleh Sultan Hamengkubuwono VII pada 3 Oktober 1889. Kerusakan tugu ini bukan hanya bersifat fisik, namun juga perubahan makna. Setelah pembangunan kembali tugu Golong Gilig lebih dikenal sebagai nama Tugu Pal Putih dibangun dengan bentuk dan gaya yang berbeda yang dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Perubahan tugu ini menandai juga adanya pergeseran simbol kekuasaan dan identitas budaya, dari representasi kosmologi Jawa.

Berdasarkan hal tersebut, kajian kebencanaan belum mengintegrasikan perspektif historis secara mendalam, beberapa penelitian terdahulu telah membahas gempa bumi dari perspektif geologi dan kebencanaan, namun kajian yang secara khusus mengaitkan peristiwa gempa bumi 1867 dengan perubahan makna simbolik dan kosmologi Jawa khususnya melalui transformasi Tugu Golong Gilig masih relative terbatas. Dengan mengkaji latar belakang gempa, dampak sosial budaya bagi masyarakat Yogyakarta, serta pembangunan dan makna filosofis Tugu Golong Gilig pasca-gempa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait hubungan antara bencana sebagai peristiwa sosial budaya dengan makna simbolik yang ada di masyarakat Jawa abad ke-19 dalam memaknai gempa. Secara praktis, penelitian ini juga relevan sebagai refleksi bagi upaya mitigasi bencana berbasis kearifan lokal, khususnya dalam memahami bagaimana nilai budaya dan simbol kolektif dapat berperan dalam proses pemulihan sosial pasca-bencana di masyarakat Yogyakarta. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif sejarah kebencanaan di Indonesia sekaligus memberikan refleksi bagi penanganan bencana di masa kini dan masa yang akan datang. Penelitian ini relevan dengan meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana geologi di Indonesia yang secara geografis berada dalam kawasan Cincin Api Pasifik, sehingga mendorong pentingnya kajian historis sebagai dasar memahami respons sosial masyarakat terhadap bencana di masa lalu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peristiwa Gempa Bumi Yogyakarta 1867. Mengacu pada Kuntowijoyo (2013), metode sejarah terdiri atas lima tahapan, yaitu pemilihan topik, kemudian heuristik (pengumpulan sumber),

verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah kebencanaan untuk memahami bencana tidak hanya dipandang sebagai fenomena geologis, namun juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan simbolik dalam kehidupan masyarakat. Kajian ini memfokuskan pada peristiwa Gempa Bumi Yogyakarta tahun 1867 serta dampaknya pada kehidupan sosial budaya masyarakat Yogyakarta pada masa itu.

Tahap awal dalam penelitian adalah heuristik, yaitu proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui penelaahan arsip-arsip kolonial, laporan Pemerintah Hindia Belanda serta surat kabar sezaman yang memuat informasi mengenai Gempa Bumi Yogyakarta tahun 1867. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, penelitian terdahulu yang relevan, dan sumber digital yang digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian. Sumber primer yang digunakan berupa surat kabar *De Locomotief* yang memuat informasi mengenai gempa bumi yang terjadi pada 10 Juni 1867, selain itu penulis juga menggunakan sumber primer berupa laporan resmi dari pemerintah Kolonial Belanda tahun 1867 yang didapat dari Arsip Nasional Republik Indonesia, laporan ini menjelaskan mengenai gempa bumi 1867 yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

Tahap berikutnya yaitu kritik sumber yang dilakukan dengan kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal digunakan untuk menilai keabsahan atau keaslian sumber, sementara kritik internal dilakukan untuk menguji isi sumber sehingga informasi yang digunakan kredibel dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu interpretasi atau penafsiran terhadap sumber dan fakta-fakta sejarah yang sudah diverifikasi. Dalam tahap ini data dianalisis secara kualitatif untuk memahami karakteristik Gempa Bumi Yogyakarta 1867 serta dampaknya terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Yogyakarta, serta makna simbolik dalam kosmologi Jawa. Dalam tahap terakhir penelitian yaitu historiografi atau penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah, penulisan hasil penelitian berupa penulisan fakta-fakta yang sudah diperoleh yang kemudian disusun secara kronologis, sistematis, dan analitis berdasarkan pada temuan yang sudah diperoleh dari proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gempa Yogyakarta 1867 Sebagai Peristiwa Sosial-Budaya

Wilayah Yogyakarta secara geologis dan sekitarnya adalah kawasan rambatan gelombang yang menjadi sumber gempa karena adanya sebuah patahan di sebelah timur yaitu patahan Opak, rambatan dari gelombang gempa ini membentang dari Bantul sampai Klaten yang mengakibatkan kerusakan yang parah atau *damage belt* (Natawidjaja, dalam "gempa Yogyakarta," 08 Juni 2008). Bencana gempa bumi di Yogyakarta berpotensi terus berulang karena wilayahnya berada di atas jalur patahan lempeng tektonik, aktifnya gempa dipicu oleh ketidakseimbangan akibat aktivitas pergerakan lempeng tektonik yaitu lempeng Australia yang menumbuk lempeng Eurasia (Prasetyadi, 2009). Karena kondisi geologis ini menunjukkan bahwa gempa 1867 tidak hanya dipahami sebagai peristiwa insidental, tetapi juga menjadi fenomena berulang sehingga gempa ini bukan sebagai kejadian tunggal, melainkan bagian dari siklus geologis jangka panjang karena dalam sejarah kebencanaan, pengulangan bencana membentuk pola memori kolektif dan cara masyarakat dalam merespon risiko dari peristiwa tersebut.

Gempa bumi di Yogyakarta terjadi pada tanggal 10 Juni 1867 dengan kekuatan sekitar 7,8 magnitudo dan tercatat sebagai salah satu gempa paling merusak dalam sejarah Jawa. Informasi mengenai peristiwa ini banyak bersumber dari laporan masa kolonial, khususnya tulisan Dr. S.W. Visser (1922) serta pemberitaan surat kabar *De Locomotief*, yang kemudian dikutip oleh Majalah Geomagz terbitan Badan Geologi Kementerian ESDM. Dalam catatan tersebut dijelaskan bahwa Yogyakarta dilanda gempa besar pada pukul 04.25 WIB yang terdiri atas dua guncangan utama. Guncangan pertama berlangsung sekitar 8 detik, disusul jeda singkat selama kurang lebih 2 detik, kemudian diikuti guncangan kedua yang jauh lebih kuat selama sekitar 70 detik. Getaran gempa ini bahkan dirasakan hingga radius sekitar 500 kilometer dari pusat gempa, pusat gempa terjadi

disepanjang aliran Sungai Opak, Bantul Yogyakarta. Akibat peristiwa tersebut Yogyakarta mengalami kerusakan yang sangat parah dengan total korban jiwa sebanyak 326 penduduk meninggal dunia, 262 yang merupakan penduduk Jawa, 46 penduduk Tionghoa, dan 14 penduduk Eropa, 4 penduduk lainnya adalah orang Timur Asing, dan 400 orang mengalami luka-luka di wilayah sekitar Kota Yogyakarta.

Kerusakan akibat gempa tidak hanya terjadi pada permukiman penduduk, tetapi juga pada bangunan penting seperti Keraton Yogyakarta, Tugu Golong Gilig, Benteng Rustenburg (Vredeburg), dan Candi Prambanan. Korban jiwa terbanyak dilaporkan berasal dari kawasan Pasar Gede, yang saat ini dikenal sebagai Pasar Legi di Kota Gede. Adapun, kantor pos serta tempat peristirahatan sultan juga mengalami kerusakan berat (Mohtar, 2023). Kerusakan pada bangunan-bangunan penting bukan hanya bermakna material, namun juga simbolik. Keraton sebagai pusat kekuasaan serta tugu yang menjadi simbol kosmologi menunjukkan bahwa gempa telah mengganggu struktur simbolik yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan analisis Dr. S.W. Visser seorang peneliti Belanda dalam bidang geologi dan astronomi, sumber gempa bumi diduga berada pada jalur barat daya timur laut di sekitar aliran Sungai Opak, yang sejalan dengan keberadaan Sesar Opak. Gempa ini juga memicu munculnya banyak retakan di permukaan tanah di wilayah selatan Yogyakarta, Bantul, hingga Klaten, Jawa Tengah.

Dampak gempa tidak hanya di wilayah Yogyakarta, namun daerah sekitar khususnya wilayah *Vorstenlanden* juga ikut merasakan guncangan gempa bumi tersebut. Sejumlah bangunan milik pemerintah Hindia Belanda, Kasunanan Surakarta, serta Pakualaman ikut mengalami dampak kerusakan akibat gempa bumi. Sarana dan prasarana seperti pabrik-pabrik gula, pasar, jalan raya, dan Candi Sewu mengalami kerusakan akibat kuatnya guncangan dari gempa bumi ini (Dien, Z. K. S., & Andani, 2021). Berdasarkan keterangan dari Koran *De Locomotief* menyebutkan akibat dari gempa Yogyakarta 1867 rumah Residen Belanda yang berada di Yogyakarta ikut rusak akibat gempa yang terjadi. Rumah Residen yang hancur akibat gempa juga menyebabkan jamuan resmi Grebeg yang merupakan tradisi lama di rumah Residen dihentikan dan tidak bisa diadakan. Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan administratif yaitu berupa pemindahan beberapa kantor akuntan ke Semarang setelah gempa terjadi.

Laporan Pemerintah Kolonial Belanda menunjukkan bahwa setelah terjadinya Gempa Bumi Yogyakarta tahun 1867, Sultan memiliki peran aktif dalam melakukan peninjauan secara langsung ke daerah-daerah yang terdampak bersama Residen, mencakup kawasan pemukiman Cina, Jawa, dan Eropa. Peristiwa gempa bumi tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berpengaruh pada aspek sosial serta ekonomi masyarakat. Pertanian dan perkebunan ikut terdampak akibat terjadinya gempa, menurut laporan pemerintah kolonial kerugian besar banyak menimpa lahan-lahan milik penduduk. Meski demikian, dalam laporan disebutkan sekitar 11.000 pikul gula atau sekitar 660 ton masih bisa diselamatkan, hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah kolonial lebih memprioritaskan kestabilan produksi komoditas ekspor dibanding dengan kondisi sosial masyarakat saat itu. Ketimpangan terjadi pada para pekerja kecil yang terdampak gempa, sebaliknya para pegawai pemerintah kolonial justru digambarkan berada dalam kondisi ekonomi yang relatif aman. Hal tersebut menunjukkan adanya jarak sosial antara pihak kolonial dengan masyarakat saat itu.

Menurut sudut pandang sosial budaya Jawa, Gempa Bumi Yogyakarta 1867 tidak dipahami hanya sebagai peristiwa geologis namun sebagai tanda atas terganggunya tatanan kosmis dan sosial khususnya dalam Keraton Yogyakarta yang menjadi pusat kekuasaan. Dalam kosmologi Jawa khususnya masyarakat Yogyakarta gempa dimaknai sebagai tanda peringatan dari alam atas ketidakseimbangan yang berkaitan dengan kondisi internal Keraton Yogyakarta, baik berupa konflik elite maupun melemahnya wibawa simbolik sultan ataupun adanya ketegangan antara keraton dan kekuasaan kolonial pada abad ke-19. Ketika ditempatkan sebagai peristiwa sosial budaya, mengandung makna simbolik dalam konteks kondisi internal politik yang terjadi dalam Keraton Yogyakarta yang ditandai dengan semakin intensifnya pengaruh kolonial Belanda. Oleh karena itu, gangguan alam yang terjadi dan berdampak dalam keraton dianggap sebagai sebuah isyarat adanya

ketidakberesan di dalam tatanan internal keraton. Masyarakat Jawa memandang alam memiliki hubungan timbal balik terhadap perilaku dari manusia dan tatanan sosial yang ada, sehingga bencana alam sering kali dianggap sebagai pertanda terganggunya keseimbangan tersebut.

Pada tradisi Jawa peristiwa yang terjadi seperti bencana alam kerap dimaknai sebagai bentuk koreksi kosmis pada penguasa yang dinilai gagal dalam menjaga harmoni (Sastrawan, 2022). Dalam hal ini Gempa Bumi yang terjadi di Yogyakarta tahun 1867 dapat dimaknai sebagai suatu kritik alam yang menghendaki penataan ulang kekuasaan dan hubungan antara raja dengan rakyatnya. Adanya kerusakan fisik berupa bangunan keraton akibat terjadinya gempa memperkuat narasi simbolik dengan runtuhnya istana keraton dan bangunan simbolik seperti Tugu Golong Gilig diartikan sebagai gambaran runtuhnya tatanan yang menopang kehidupan sosial dalam masyarakat Yogyakarta masa itu. Legitimasi kekuasaan sultan bersifat kosmologis dan simbolik, maka jika pusat simbol terganggu atau runtuh mengartikan bahwa wibawa politik dan kekuasaan ikut dipertanyakan. Dengan kata lain, gempa berfungsi sebagai *moral commentary* terhadap kondisi sosial-politik khususnya melemahnya otoritas keraton di bawah tekanan kolonial.

Perubahan Tugu Golong Gilig Pasca Gempa 1867 dan Pergeseran Makna Simbolik

Gempa bumi Yogyakarta tahun 1867 menyebabkan banyak kerusakan bangunan fisik, salah satunya bangunan penting yang ikut terdampak akibat gempa yaitu Tugu Golong Gilig. Tugu ini merupakan bangunan penting yang dibangun pada tahun 1755 sebagai simbol persatuan rakyat dengan sultan yang dibangun pada masa Sultan Hamengku Buwono. Tugu Golong Gilig memiliki makna simbolis sebagai representasi semangat persatuan antara rakyat dan raja. Tugu ini juga mengandung filosofi *Manunggaling Kawula Gusti*, yaitu sebuah konsep yang menggambarkan kesatuan tidak hanya antara rakyat dan penguasa atau raja, tetapi juga antara manusia dengan kehendak Sang Pencipta. Makna persatuan tersebut Golong Gilig tercermin dalam bentuk fisik tugu, tiang yang berbentuk silinder (*gilig*) dan bagian puncak yang berbentuk bulat (*golog*). Selain itu, tugu ini berfungsi sebagai petunjuk arah bagi Sri Sultan Hamengku Buwono I saat bermeditasi dengan menghadap ke arah puncak Gunung Merapi.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sumbu filosofis yaitu sebuah garis lurus imajiner membentang lurus dari Gunung Merapi sebelah utara hingga Laut Selatan dan melalui sebuah titik penting yaitu Tugu Golong Gilig, Keraton Yogyakarta, dan Panggung Krapyak. Sumbu imajiner merupakan garis khayal yang memanjang dari Gunung Merapi di sebelah utara hingga Laut Selatan (Samaratunga, 2018). Damarjati Supadjar berpendapat bahwa Kota Yogyakarta ditata berdasar pada integral makro dan mikro kosmologis yang mencakup dimensi spatial. Kelima titik tersebut memiliki penjelasan masing-masing seperti Gunung Merapi sendiri yang merupakan batas utara dari garis imajiner Yogyakarta yang menyimbolkan sumber kesuburan serta sumber energi kehidupan berupa api atau *dahana*. Titik kedua yaitu Tugu Golong Gilig yang melambangkan konsep dari *Manunggaling Kawula Lan Gusti* yaitu kesatuan antara raja dan rakyatnya.

Titik selanjutnya yaitu Keraton Yogyakarta itu sendiri yang dibangun pada 1755 dengan Sultan Hamengku Buwono sebagai arsitek atau pengatur tata letak keraton selain mempertimbangkan unsur estetika juga didasarkan unsur simbolik, filosofis serta religi. Titik keempat yaitu Panggung Krapyak yang merupakan bangunan yang memiliki dua lantai dan difungsikan sebagai tempat untuk peristirahatan raja serta keluarganya saat melakukan perburuan di Hutan Krapyak. Panggung Krapyak mengandung filosofi Jawa *Sangkan Paraning Dumadi*, yaitu konsep tentang perjalanan hidup manusia dari lahir sampai kematian. Secara sederhana, tugu melambangkan Lingga (laki-laki), sedangkan Krapyak melambangkan Yoni (perempuan). Kedua simbol ini menggambarkan kehidupan manusia atau *jagad alit*, yang merepresentasikan proses awal hingga akhir kehidupan. Hal ini digambarkan dalam tata ruang kota yang membentang dari selatan, yaitu Krapyak menuju utara dan berakhir di tugu. Adapun titik terakhir yaitu Laut Selatan yang bermakna tempat yang sangat luas yang menjadi simbol dimana laut sebagai tempat lautan ilmu, laut yang memiliki simbol air memiliki filosofi seperti seorang ibu yang memiliki sifat tenang dan mengayomi.

Sumbu tersebut terdiri dari lima unsur penting yang berada di Yogyakarta dan secara tak langsung menggabungkan kelima unsur itu yang membentuk garis lurus yang membentang dari utara lurus hingga ke selatan. Dari kelima tempat itu menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dan manusia, serta manusia dengan alam yang disimbolkan dengan lima titik meliputi air atau *tirta* yang berasal dari laut selatan, api atau *dahana* yang berasal dari Gunung Merapi, angin atau *maruta* dan angkasa atau *ether*, serta tanah atau *bantala* yang berasal dari tanah Yogyakarta itu sendiri. Dalam penataan kota Yogyakarta, prinsip utama yang digunakan sebagai dasar pembangunan keraton adalah konsep *Hamemayu Hayuning Bawono*, yang bermakna menjaga keselamatan serta kelestarian alam. Konsep ini direalisasikan oleh Sultan Hamengku Buwono I melalui penetapan Gunung Merapi serta Laut Selatan sebagai poros utama, sehingga tata ruang kota membentuk garis imajiner yang membentang lurus dari utara ke selatan. Bagi sebagian masyarakat Yogyakarta, garis imajiner memiliki makna filosofis yang penting, yaitu kehidupan yang selaras antara *jagad cilik* atau mikrokosmos dan *jagad gede* atau makrokosmos yang mana keduanya harus dijaga keseimbangannya agar tidak terjadi ketimpangan (Samaratunga, 2018).

Akibat gempa bumi tahun 1867 Tugu Golong Gilig mengalami keruntuhan hingga sepertiga bagiannya. Peristiwa tersebut diabadikan dalam *Candra Sengkala "Obah Trus Pitung Bumi"*, yang bermakna bumi berguncang secara terus menerus. Keruntuhan terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII, dan selama beberapa tahun tugu tidak segera direkonstruksi kembali sehingga sempat terbengkalai. Perbaikan kembali tugu dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, JWS van Brussel, dengan pengawasan Patih Danurejo V. Pembangunan kembali tugu ini dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda dan diresmikan oleh Sultan Hamengku Buwono VII pada 3 Oktober 1889 atau 7 Sapar 1819 dalam Tahun Jawa, namun pembangunan kembali Tugu ini merubah hampir seluruh bentuk aslinya menjadi lebih sederhana yang semula berbentuk golong dan gilig dengan tinggi 25 meter menjadi bentuk persegi dan memiliki ujung yang kerucut yang lancip dengan tinggi 10 meter menjadi lebih pendek dari sebelumnya, setelah proses renovasi hanya memiliki tinggi sekitar 15 meter.

Setelah mengalami proses renovasi, tugu mengalami perubahan bentuk menjadi lebih pendek dari ukuran sebelumnya, bentuknya yang berubah menjadi persegi dan warnanya putih kemudian disebut dengan *De Wittte Paal* (tiang putih). Penamaan tersebut didasarkan fungsi tugu sebagai penanda berupa tonggak yang dicat putih, sehingga mudah terlihat jelas dari kejauhan. Hingga saat ini, Tugu Golong Gilig lebih dikenal dengan sebutan Tugu Pal Putih (Santoso, 2024). Bentuk dari tugu memiliki makna tersendiri, adanya trap tiga berundak yang menjadi dasar tugu menyimbolkan fungsi yaitu sebagai lambang dari kekuatan sakral, sebagai penanda batas Keraton Yogyakarta yang membentang dari Krapyak hingga bagian utara yang dibatasi oleh tugu, serta sebagai titik pandang dalam struktur tata ruang kota. Tiga trap ini melambangkan konsep ajaran Buddha tentang tahapan perjalanan manusia menuju kesempurnaan, yaitu *Kamadhatu* melambangkan tahap kehidupan manusia yang masih terikat dan dikuasai hawa nafsu, *Rupadhatu* melambangkan kondisi manusia yang sudah tidak terikat hawa nafsu namun masih terikat pada bentuk, wujud atau rupa, dan *Arupadhatu* melambangkan tingkatan tertinggi dimana manusia memasuki keadaan suci dan menuju kesempurnaan. Tahapan pertama yaitu awal kehidupan manusia yaitu lahir dan tumbuh, lalu trap kedua tahap mencari makna hidup, dan trap ketiga yang merupakan tahap tertinggi yaitu kesempurnaan.

Ditengarai perubahan desain bentuk tugu merupakan strategi Belanda untuk menghilangkan simbol persatuan antara rakyat dan rajanya. Renovasi Tugu Golong Gilig yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dapat dipahami sebagai strategi untuk melemahkan persatuan antara rakyat dan raja. Namun, menurut Wiranata Sujarweni dalam Buku Menelusuri Jejak Mataram Islam di Yogyakarta (2021), upaya tersebut gagal tidak berhasil seiring dengan tetap kuatnya perjuangan rakyat dengan raja saat itu. Perubahan bentuk tugu mengindikasikan pergeseran makna dari simbol kesatuan kosmis. Saat ini, tugu lebih merepresentasikan keberadaan raja secara individual, tidak lagi mencerminkan hubungan antara raja dan rakyatnya sebagaimana

terkandung dalam filosofi *Manunggaling Kawula Gusti*. Dengan demikian, fungsi simboliknya berubah dari lambang keraton menjadi sekadar ikon Kota Yogyakarta saja.

Pemaknaan Gempa 1867 dalam Perspektif Masyarakat Jawa

Dalam sistem kepercayaan Jawa atau *Javanisme*, terdapat keyakinan bahwa seuruh unsur yang ada di dunia pada dasarnya merupakan sebuah satu kesatuan kehidupan yang saling terhubung dalam kosmos alam semesta. Dalam pandangan ini, orang Jawa merumuskan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari keterikatannya dengan alam semesta secara menyeluruh. Masyarakat Jawa membagi konsep kehidupan, yaitu *makrokosmos* dan *mikrokosmos*. *Makrokosmos* merujuk pada pandangan hidup terhadap alam semesta yang dianggap memiliki kekuatan supranatural serta bersifat misterius. Sementara itu, *mikrokosmos* dipahami sebagai dunia nyata tempat manusia hidup dengan tujuan utamanya mencapai keseimbangan dan keselarasan antara kedua kosmos tersebut. Dalam konsep *makrokosmos*, Tuhan dipandang sebagai pusat dari alam semesta, sedangkan dalam *mikrokosmos* pusat kehidupan dan spiritual berada pada seorang raja. Raja dianggap sebagai representasi Tuhan di dunia yang memiliki kekuatan-kekuatan kosmis untuk menjaga ketentraman, keadilan serta kesuburan (Haryati, 2017).

Pada abad ke-19 masyarakat Yogyakarta masih memegang kepercayaan terhadap adanya tiga penguasa utama yaitu penguasa dunia atas, bawah, dan tengah yang mana ketiganya diyakini berperan menjaga harmoni kosmos. Penempatan lokasi Keraton secara filosofis yaitu bermakna keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dan alam. Gempa bumi kemudian dimaknai sebagai tanda terganggunya keseimbangan antara tiga penguasa keseimbangan yaitu antara manusia (*jagad cilik*), alam semesta (*jagad gede*), dan tatanan kekuasaan, khususnya yang berpusat pada Keraton Yogyakarta. Pada zaman dahulu setiap adanya fenomena gejala alam selalu dikaitkan dengan mitos dan kekuatan supranatural, hal ini tak lepas dari adanya pengaruh keterbatasan intelektual dan ilmu pengetahuan dalam masyarakat masa itu. Banyak mitos-mitos yang berkebaruan pada zaman dulu bahkan hingga saat ini masih dipercayai oleh sebagian masyarakat.

Secara aksiologis, gempa bumi dalam tradisi ilmu ramalan dipahami sebagai suatu tanda yang menandai peristiwa yang diperkirakan akan terjadi dan dialami oleh manusia. Penafsiran terhadap gempa sebagai bentuk prediksi memiliki berbagai makna yang berbeda-beda. Berdasarkan narasi ramalan gempa bumi dalam manuskrip *Serat Primbon* koleksi Keraton Kesultanan Yogyakarta Nomor D6/M69/Bh139, makna prediktif gempa bumi dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti peristiwa alam, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam konteks ini, gempa diposisikan sebagai simbol atau tanda yang tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat logis atau rasional, melainkan bersifat subjektif dan imajinatif. Dalam tradisi masyarakat Jawa, setiap peristiwa alam maupun perubahan sosial yang terjadi umumnya selalu diberi penafsiran makna serta disertai ritual atau upacara. Sejalan dengan hal tersebut, dalam *Serat Primbon*, peristiwa alam seperti gempa bumi tidak hanya dimaknai secara simbolik, tetapi juga direspons melalui sebuah pelaksanaan upacara seperti *sedekahan* atau *slametan* sebagai bentuk penghormatan dan keseimbangan kosmis (Ramadhan, 2025).

Dalam tradisi masyarakat Jawa prediksi terjadinya gempa bumi melalui ilmu titen dengan pembacaan waktu terutama bulan-bulan tertentu dalam kalender Jawa yang dikaitkan dengan tanda-tanda alam dan kondisi sosial. Pertanda akan terjadinya suatu bencana alam seperti gempa bumi dijelaskan dalam *Serat Primbon* Koleksi Keraton Kesultanan Yogyakarta Nomor D6/M69/Bh139, dari bulan terjadinya dalam kalender Jawa, waktunya sampai ramalannya. Sebagai contoh, gempa yang terjadi pada bulan *Sura* pada siang hari menandakan banyak orang mengalami keprihatinan, sedangkan jika terjadi pada malam hari diartikan sebagai indikasi kekurangan atau kelangkaan bahan pangan beras atau padi. Apabila gempa terjadi pada bulan *Sapar* pada siang hari, hal itu dimaknai sebagai tanda banyak orang berpindah-pindah tempat. Sementara itu, gempa yang terjadi di bulan *Rabiulawal* siang hari menunjukkan banyak orang mengalami penganiayaan, dan jika terjadi pada malam hari menandakan banyak orang jatuh sakit. Pada bulan *Jumadilawal*, gempa terjadi

pada siang hari berarti sebagai tanda cuaca yang sangat dingin, jika malam hari dipahami sebagai pertanda musim kemarau yang panjang dan panas yang menyebabkan kerusakan tanaman. Adapun gempa pada bulan *Rajeb* di siang hari dikaitkan dengan munculnya banyak wabah penyakit yang parah, dan jika terjadi malam hari menandakan terjadinya peperangan atau konflik di wilayah Barat (Gusmian, 2020).

Berdasarkan data dari primbon, gempa yang terjadi pada malam hari dimaknai sebagai pertanda terjadinya krisis sosial, seperti kekurangan pangan, adanya penyakit atau wabah, perpindahan penduduk, hingga adanya konflik atau peperangan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan gempa bumi 1867 yang dimana peristiwa ini dipahami sebagai akibat terganggunya keseimbangan antara kekuasaan politik, para eite, dan kosmis yang kemudian ditegur melalui sebuah bencana alam. Pemaknaan gempa yang terjadi dalam konteks Keraton Yogyakarta sering diartikan sebagai sebuah peringatan atau *dhawuh alam* yang ditujukan kepada raja atau elite keraton. Jika terjadi bencana besar seperti gempa dipahami sebagai simbol ketidakberesan yang terjadi dalam tata pemerintahan, internal keraton itu sendiri, atau melemahnya wibawa politik akibat banyaknya campur tangan dari pemerintahan kolonial Belanda.

Dalam perspektif orang Jawa sebuah peristiwa biasanya dikaitkan dengan keberadaan manusia itu sendiri dan setiap kebaikan maupun keburukan muncul akibat suatu peristiwa. Orang Jawa memiliki sisi kesadaran akan sebuah kaitan erat hubungan antara manusia dengan alam semesta. Menjaga keseimbangan lingkungan alam serta mengharmonisasikan pola dan siklus alam merupakan bagian dari kesadaran yang melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Di masyarakat Jawa banyak sekali tradisi yang biasanya dikaitkan dengan keberadaan alam. Tradisi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai upacara seperti sedekah bumi, sedekah laut, dan berbagai doa yang ditujukan secara langsung pada alam, misalnya doa bumi dan doa tolak bala. Setelah terjadinya gempa bumi, masyarakat Jawa pada umumnya melakukan ritual *slamatan* tolak bala sebagai upaya simbolik untuk memulihkan kembali keseimbangan kosmis. Jika gempa bumi ditafsirkan sebagai pertanda buruk, maka *slamatan* biasanya disertai dengan unsur *ruwatan*. *Ruwatan* bertujuan untuk menyucikan kembali bumi yang dianggap mengalami ketidakseimbangan dan sebagai wujud syukur dan permintaan kepada Sang Pencipta agar bencana serupa tidak terulang kembali. Prediksi gempa berdasarkan waktu atau bulan Jawa mencerminkan bahwa masyarakat memiliki sistem pengetahuan lokal (*local knowledge system*) dalam memahami bencana alam. Penggunaan primbon sebagai sumber menunjukkan adanya rasionalitas simbolik meskipun tidak berdasarkan pada sains modern, tetapi berfungsi sebagai alat prediksi sosial dengan logika internal konsisten yang dimiliki oleh masyarakat Jawa.

Dalam peristiwa Gempa Bumi Yogyakarta tahun 1867 terjadi pada bulan *Sapar* dalam penanggalan Jawa, yang mana berdasarkan ramalan Manuskrip *Serat Primbon* Koleksi Keraton Kesultanan Yogyakarta Nomor D6/M269/Bh139 peristiwa tersebut pertanda banyak orang berpindah dan mengharuskan dilakukan doa serta *slamatan* dengan sajian berupa nasi uduk dan lauk *ayam tulak*. Istilah *ayam tulak* dalam tradisi Jawa merujuk pada ayam yang digunakan sebagai sarana ritual penolak bala, karena kata "*tulak*" sendiri berarti menolak. Hal ini dimaksudkan sebagai sesaji yang digunakan dalam *slamatan* yang bertujuan untuk menangkal kesialan, energi negatif maupun marabahaya setelah terjadinya gempa bumi. Masyarakat Yogyakarta dalam merespon bencana gempa bumi atau dalam Bahasa Jawa disebut *lindu* biasanya dengan mengadakan *slamatan* memanjatkan doa bersama di dekat Kali Opak yang sering menjadi pusat terjadinya gempa. Jika gempa berkaitan dengan gunung berapi, masyarakat menggelar Upacara Labuhan atau persembahan ke Laut Selatan atau Gunung Merapi (Gusmian, 2019). Dengan demikian gempa 1867 menjadi peristiwa yang membentuk cara berpikir dan keyakinan masyarakat Yogyakarta dalam memaknai hubungan mereka dengan alam dan kekuasaan. Dalam pandangan masyarakat gempa bumi bukanlah hanya sebatas peristiwa alam, namun juga sebagai sistem tanda yang memiliki makna nilai-nilai sosial dan religiusitas yang mencerminkan tentang pandangan orang Jawa dalam menjaga keselarasan dengan alam, dengan manusia, dan segala peristiwa dipahami sebagai titah dari Tuhan.

PENUTUP

Gempa bumi Yogyakarta tahun 1867 merupakan bencana alam yang tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik namun juga membawa implikasi sosial-budaya serta simbolik bagi masyarakat Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa Gempa Bumi Yogyakarta tahun 1867 tidak hanya merupakan peristiwa geologis, tetapi juga mempunyai dimensi sosial, budaya, dan simbolik dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta abad ke-19. Runtuhnya Tugu Golong Gilig dimaknai masyarakat sebagai terganggunya keseimbangan kosmis yang menghubungkan raja, rakyat, dan alam dalam kosmologi Jawa. Berdasarkan penelitian ini, kajian mengenai gempa bumi di Indonesia sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek geologis dan teknis saja, tetapi juga dengan pendekatan sejarah perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya menjaga memori kolektif masyarakat dan sebagai refleksi pembelajaran sejarah kebencanaan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, sejarah gempa Yogyakarta 1867 memberikan pembelajaran penting, adanya simbol-simbol budaya seperti Tugu Pal Putih perlu dipahami bukan hanya sebagai ikon atau bangunan saja, tetapi sebagai pengingat historis terjadinya peristiwa gempa bumi yang terjadi serta perubahan sosial-budaya yang menyertainya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan kajian sejarah kebencanaan dengan pendekatan yang lebih luas lagi, melalui analisis perbandingan dengan peristiwa gempa lain di Jawa atau mengkaji respon sosial masyarakat terhadap terjadinya bencana alam dalam periode sejarah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. (2024). *Geologi Gempa Bumi Indonesia*. UGM PRESS.
- Cahyani, S. D., & Sukandar, P. A. (2022). Masa Depan Pada Pra-Perancangan Mozaik Jogja. *MINTAKAT: Jurnal Arsitektur*, 23(2), 111–119.
- De Aardbeving van den 10 Junij 1867 in Djokjakarta*. (1867).
- Dien, Z. K. S., & Andani, R. T. (2021). *Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Indonesia Masa Kolonial Belanda*. 83–92.
- Dwiadmojo, G. N. (2020). Koneksi Pusat dan Pinggiran: Perbandingan Teks Primbon Palindon Kraton Yogyakarta dan Palilindon Merapi-Merbabu. *Jurnal Manuskrip Nusantara*, 11(1), 19–36. <https://doi.org/10.37014/jumantara.v11i1.679>
- Gusmian, I. (2019). *Earthquakes in Javanese theological interpretation : The study of Serat Primbon manuscripts from the Yogyakarta Sultanate Palace*. 3(2), 75–88. <https://doi.org/10.22515/sustinere.jes.v3i2.79>
- Gusmian, I. (2020). Gempa Bumi dalam Pandangan-Dunia Orang Jawa : Studi atas Dua Manuskrip Primbon Jawa Abad ke-19 M Earthquakes in Javanese World-View : *Study on*. 241–272.
- Haryati, T. A. (2017). Kosmologi Jawa Sebagai Landasan Filosofis Etika Lingkungan. *RELIGIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(2), 174–189.
- Hidayat, E. (2023). *Geomorfologi Tektonik dan Indikasi Aktivitas Neotektonik Daerah Karangsambung, Jawa Tengah*. Padjajaran.
- Hieronymus Budi Santoso, J. B. S. (2024). *Sri Sultan Hamengku Buwono VII: Memimpin Transisi Menuju Modernisasi*. Pohon Cahaya Semesta.
- Istiana, I. I., & Sumiyardana, K. (2023). *Makna Gerhana dan Gempa Bagi Orang Jawa: Studi Terhadap Naskah Keraton. Belajar dari Leluhur: Manuskrip dan Tradisi Lisan sebagai Sumber Pengetahuan Ekologi dan Mitigasi Bencana*. Penerbit Adab.
- Kontinjensi, P. (2016). Diskresi dalam Penanggulangan Bencana di DIY dengan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 461–485.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Lupiyanto, R. (2021). *Sejarah Gempa Dan Hikmah Keistimewaan Bumi Yogyakarta*. Bnbp Portal Literasi Sejarah Bencana. <https://sejarah.dibi.bnbp.go.id/artikel/sejarah-gempa-dan-hikmah-keistimewaan-bumi-yogyakarta/13>
- Mentaru, A. V. D., Amanda, M. C., Prasetyo, D. A. B., & Purwoko, R. Y. P. R. Y. (2023). Kajian

- Ethnomatematika Pada Sumbu Filosofis Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 16, 1–12.
- Morin, L. . (2014). *Problematika Tugu Yogyakarta dari Aspek Fungsi dan Makna*. Dwi - Quantum.
- Murjaya, J. (2021). Studi Pendahuluan Penentuan Strain Rate Kerak Bumi Sesar Kali Opak Berdasarkan Gempa Bumi Yogyakarta 27 Mei 2006 dan 1867. *Relawan Jurnal Indonesia*, 1(1), 14–23.
- Permadi, D. P., & Kholis, N. (2024a). Empat Jalan Menuju Ketuhanan : Memahami Sumbu Filosofis Keraton Yogyakarta Dalam Perspektif Filsafat Kebudayaan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v18i1.xxxx>
- Permadi, D. P., & Kholis, N. (2024b). PUNJERING NGAURIP : Understanding the Yogyakarta Palace on the Philosophical Axis of the Yogyakarta Palace in the Perspective of Cultural Philosophy. *Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 4668(1), 1–22.
- Politiek Verslag The Resident Djokjakarta Over Het Jaar 1867*. (1867).
- Prasetyadi, C. (2009). Principles of Plate Tectonics and Structural Geology. In *Materi dari Kursus Geology for Nongeologist*. Pengda IAGI Yogyakarta.
- Ramadhan, et al. (2025). Preservasi Pengetahuan Lokal Kebencanaan Serat Primbon: Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa Bumi Berbasis Local Wisdom. *KANDAI*, 21(1), 109–121. <https://doi.org/10.26499/jk.v21i1.7821>
- Sabdacarakatama, K. (2009). *Sejarah Keraton Yogyakarta*. Penerbit Narasi.
- Samaratungga, O. (2018). Eksplorasi Teknis fotografi Udara Poros Imajiner daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Rekam*, 14(2), 115–124.
- Sastrawan, W. J. (2022). *Portents of Power : Natural Disasters throughout Indonesian History Wayan Jarrah Sastrawan*. 30(113), 9–30.
- Sejarah, J., & Mohtar, O. (2023). Sejarah dan Budaya: *Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 17(1), 14–25. <https://doi.org/10.17977/um020v17i12023p14-25>
- Septiani, E., & Sari, N. I. (2023). Analisis Semantik Desain Bangunan di Yogyakarta Dalam Perspektif Etnomatematika. *Pujangga*, 9, 38–48.
- Suharmaji, L. (2020). *GEGER SEPOY Sejarah Kelam Perseteruan Inggris dengan Keraton Yogyakarta (1812-1815)*. Araska Publisher.
- Sujarweni, V. (2021). *Menelusuri Jejak Mataram Islam di Yogyakarta*. Anak Hebat Indonesia.
- Thohari, A. M. (2022). Kearifan Lingkungan : Tradisi Masyarakat Jawa dalam Upaya Menghormati Entitas Alam. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 10(1).
- Tifada, D.A., & Winardi, A. . (2022). *History Today 10 June 1867: Yogyakarta Was Hit By A Great Earthquake 8.0 On The Richter Scale*. <https://voi.id/en/memori/177394>
- Uddin, B., Nurhajarini, R., Sejarah, P., Budaya, F. I., Mada, U. G., Pelestarian, B., Budaya, N., Yogyakarta, D. I., Brigjen, J., & No, K. (2018). Mangkubumi sang arsitek kota yogyakarta. *Jurnal Patrawidya*, 75–92.
- Wibawa, S., D. (2023). *Buku Induk Pendidikan Khas Kejogjaan*. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.